

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  
SISTEM PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana  
Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Disusun Oleh:**

**Lisudatu Trifosa Allorante**

**NPM : 160422921**

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**Skripsi**

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,**

**SISTEM PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP**

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Disusun Oleh:**

**LISUDATU TRIFOSA ALLORANTE**

**NPM : 160422921**

Telah dibaca dan disetujui oleh:

Pembimbing

Ch. Heni Kurniawan, S.E.,M.Si.

12 Maret 2021



**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

**SURAT KETERANGAN**

No. 340/J/I

Berdasarkan dari Ujian Pendadaran yang diselenggarakan pada hari Jumat, 12 Maret 2021 dengan susunan penguji sebagai berikut:

1. Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si. (Ketua Penguji)
2. Drs. YB. Sigit Hutomo, MBAcc., Akt., CA., CSA. (Anggota)
3. Ign. Novianto Hariwibowo, SE., M.Acc. (Anggota)

Tim Penguji Pendadaran Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta telah memutuskan bahwa:

Nama : Lisudatu Trifosa Allorante

NPM 160422921

Dinyatakan

**Lulus Dengan Revisi**

Pada saat ini skripsi Lisudatu Trifosa Allorante telah selesai direvisi dan revisian tersebut telah diperiksa dan disetujui oleh semua anggota panitia penguji.

Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan untuk keperluan Yudisium kelulusan Sarjana Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UAJY.

Dekan,



**Drs. Budi Suprpto, MBA., Ph.D.**  
Fakultas Bisnis dan Ekonomika

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,**

**SISTEM PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP**


**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Benar-benar hasil karya saya sendiri. Pernyataan, ide, maupun kutipan baik langsung maupun tak langsung yang bersumber tulisan atau ide orang lain dinyatakan secara tertulis dalam skripsi ini dalam catatan perut daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan plagiasi sebagian atau seluruhnya dari skripsi ini, maka gelar dan ijazah yang saya peroleh dinyatakan batal dan akan saya kembalikan kepada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 12 Maret 2021

Yang menyatakan



**Lisudatu Trifosa Allorante**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan tuntunanNya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk dapat menyelesaikan program strata satu (S1). Peneliti menyadari bahwa sepanjang proses penulisan skripsi ini tidak terlepas dari doa, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin menghargai dengan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kebaikan, kekuatan, dan kasihNya yang selalu dilimpahkan tiap hari kepada penulis selama proses kuliah dan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Ch. Heni Kurniawan, S.E., M.Si., sebagai dosen pembimbing yang telah mengarahkan, membimbing, dan memberikan koreksi serta masukan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Kedua orang tua penulis Bapak Efraim P. Allorante dan Ibu Wahidah Jamaludin serta saudara terkasih Dionisius Allorante dan Larasati Allorante yang tiada hentinya mendoakan, memberi semangat, menasehati, membantu dan menjadi motivasi penulis dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

4. Clara, Fidel, Sonia, Liani, Ogi, Agata, Putri, Stela, Hatami, dan Gilang, sahabat penulis yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.
5. Saudara dan sahabat terkasih JOY FELLOWSHIP INDONESIA yang selalu mendoakan, mendengar keluh kesah dan selalu memberikan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
6. Teman-teman anak bimbingan Pak Iwan yaitu Aurel, Helen, Betri dan Thasia yang selalu memberi bantuan dan semangat dalam pengerjaan skripsi.
7. Semua pihak yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Penulis pun menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan guna sebagai pembelajaran untuk penelitian pada kesempatan yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Yogyakarta, 12 Maret 2021  
Yang menyatakan



**Lisudatu Trifosa Allorante**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
DAFTAR TABEL .....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	9
2.1. Anggaran.....	9
2.1.1. Definisi Anggaran.....	9
2.1.2. Karakteristik Anggaran.....	9
2.1.3. Fungsi Anggaran.....	10

2.1.4. Pendekatan Dalam Pemyusunan Anggaran.....	11
2.2. Partisipasi Anggaran .....	12
2.2.1. Definis Partisipasi Anggaran.....	12
2.2.2. Karakteristik Partisipasi Anggaran.....	13
2.3. Kejelasan Sasaran Anggaran.....	14
2.3.1. Definisi Kejelasan Sasaran Anggaran.....	14
2.3.2. Karakteristik Kejelasan Sasaran Anggaran.....	15
2.3.3. Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran.....	15
2.4. Sistem Pelaporan .....	16
2.4.1. Definisi Sistem Pelaporan.....	16
2.4.2. Komponen Sistem Pelaporan.....	17
2.5. Pengendalian Internal .....	22
2.5.1. Definsi Pengendalian Internal.....	22
2.5.2. Unsur-unsur Pengendalian Internal.....	23
2.5.3. Tujuan Pengendalian Internal.....	26
2.6. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	27
2.6.1. Definisi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	27



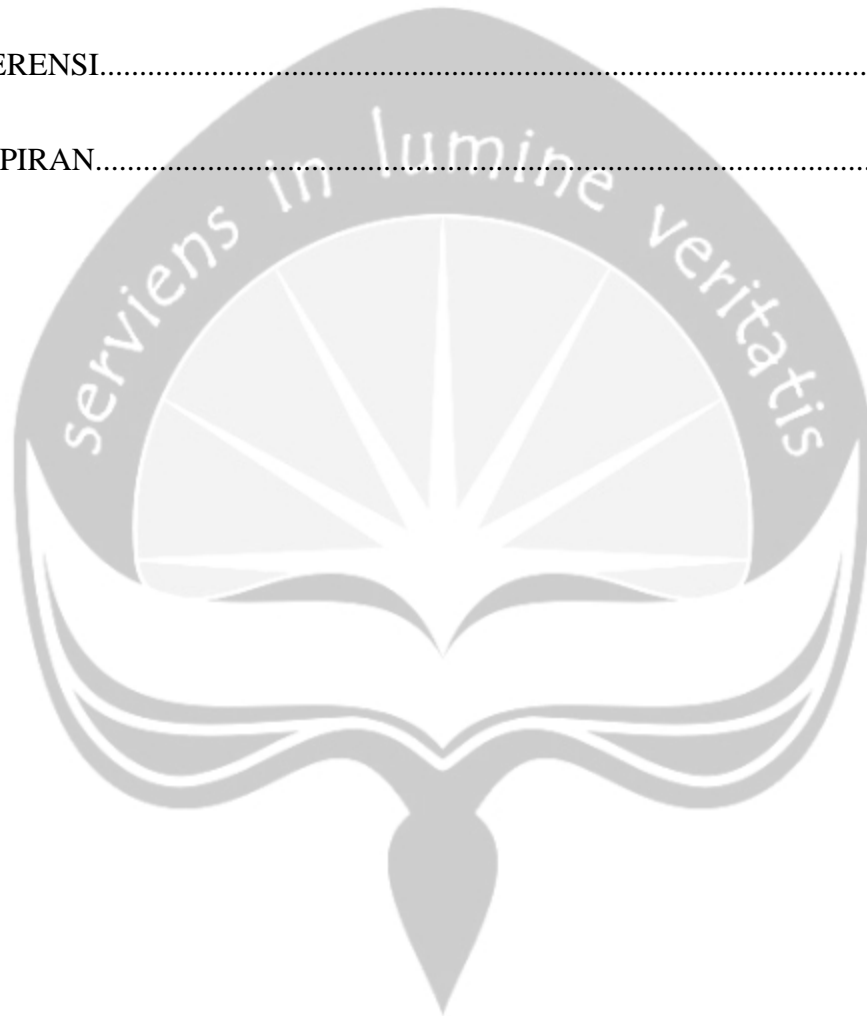
2.6.2. Dimensi Akuntabilitas.....	29
2.6.3. Siklus Akuntabilitas Kinerja.....	30
2.7. Kerangka Konseptual.....	31
2.7.1. Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ) .....	31
2.7.2. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	33
2.7.3. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	33
2.7.4. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	34
2.7.5. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	35
2.8. Penelitian Terdahulu.....	36
2.9. Pengembangan Hipotesis.....	39
2.9.1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	39
2.9.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	40

2.9.3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja	
Instansi Pemerintah.....	41
2.9.4. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja	
Instansi Pemerintah.....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>44</b>
3.1. Objek dan Subjek Penelitian.....	44
3.2. Populasi.....	44
3.3. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	45
3.4. Variabel Penelitian.....	46
3.5. Operasionalisasi Variabel.....	46
3.6. Model Penelitian.....	52
3.7. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.8. Analisa Data.....	54
3.8.1. Uji Pendahuluan.....	54
3.8.1.1. Uji Alat.....	54
3.8.1.2. Uji Deskriptif.....	55
3.8.1.3. Uji Normalitas.....	55

3.8.1.4. Uji Asumsi.....	56
3.9. Uji Hipotesis.....	57
3.9.1. Hipotesis Statistik.....	57
3.9.2. Tingkat Kesalahan ( $\alpha$ ) .....	58
3.9.3. Model Pengujian.....	59
3.9.4. Kriteria Pengujian.....	61
3.9.4.1. Uji Nilai t.....	61
3.9.4.2. Uji F.....	61
3.9.4.3. Uji Koefisien Determinasi.....	61
3.10. Rencana Pembahasan.....	62
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	63
4.1.1. Deskripsi Data.....	63
4.1.2. Deskripsi Responden.....	66
4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data.....	68
4.2.1. Uji Pendahuluan.....	68
4.2.1.1. Uji Alat.....	68

4.2.1.2. Statistik Deskriptif.....	71
4.2.1.3. Uji Asumsi Klasik.....	74
4.2.2 Uji Hipotesis.....	77
4.2.2.1. Pengujian Statistik.....	77
4.2.2.2. Uji t.....	79
4.2.2.3. Uji F.....	80
4.2.2.4. Koefisien Determinasi.....	82
4.3. Pembahasan.....	82
4.3.1. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	82
4.3.2. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	83
4.3.3. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	85
4.3.4. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.....	86
BAB V PENUTUP.....	88
5.1. Kesimpulan.....	88

5.2. Keterbatasan Penelitian.....	93
5.3. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
REFERENSI.....	99
LAMPIRAN.....	100



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel.....	46
Tabel 4.1. Penyebaran Kuesioner.....	64
Tabel 4.2. Deskripsi Responden.....	66
Tabel 4.3. Hasil Uji Validitas.....	68
Tabel 4.4. Hasil Uji Reabilitas.....	70
Tabel 4.5. Pengelompokan Interval .....	71
Tabel 4.6. Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	71
Tabel 4.7. Uji Normalitas.....	74
Tabel 4.8. Uji Multikolinearitas.....	75
Tabel 4.9. Uji Heterokedastisitas.....	76
Tabel 4.10. Analisis Regresi Linear Berganda.....	77
Tabel 4.11. Hasil Uji F.....	81
Tabel 4.12. Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	82

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Model Penelitian .....	52
Gambar 3.2. Pengujian Satu Sisi .....	59



**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,  
SISTEM PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Disusun Oleh:**

**Lisudatu Trifosa Allorante**

**NPM: 160422921**

**Pembimbing**

**Ch. Heni Kurniawan, SE., M.Si**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan variabel independennya adalah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian internal.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh kepala badan/dinas, kepala bagian/bidang, kepala seksi dan staf keuangan pada OPD yang berada disekitar lingkungan Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah 107 responden. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan *purposive sampling*. Data kuesioner diuji dengan uji validitas, uji reliabilitas, dan pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda.

Kesimpulan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti adalah bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata Kunci:** Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Internal dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Era reformasi memberikan banyak perubahan yang lebih baik khususnya terhadap tata pemerintahan, dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka tuntutan otonomi daerah menjadi lebih luas dan akuntabilitas publik yang nyata harus diberikan oleh Pemerintah Daerah (Halim, 2007).

Pengelolaan anggaran pemerintah daerah merupakan wujud dari pemerintah yang memiliki akuntabilitas. Menurut (Mardiasmo, 2009), demi terwujudnya *good governance* maka dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban pemerintah, yaitu pertanggungjawaban vertikal dan horizontal. Dua jenis pertanggungjawaban tersebut merupakan elemen penting dalam proses akuntabilitas. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan beberapa hal, antara lain: anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian internal.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2002) yang mengatakan anggaran berfungsi sebagai: alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan sumber daya tersebut dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Menurut Kennis (1979), karakteristik anggaran adalah partisipasi penyusunan anggaran dan kejelasan sasaran anggaran. Partisipasi dalam penyusunan anggaran merupakan keterlibatan staf dan manajer. Partisipasi dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan motivasi dan tanggung jawab staf dan manajer terhadap pencapaian target anggaran. Pada konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat, untuk menyusun anggaran sesuai sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Selain anggaran untuk memantau dan mengendalikan kinerja pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawabannya terhadap publik, dalam mengimplementasikan anggaran juga diperlukan sistem pelaporan yang baik. Sistem pelaporan yang baik pun didukung oleh pengendalian internal yang baik. Pelaksanaan pengendalian internal terhadap kinerja akuntabilitas instansi sangatlah penting dilakukan, agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan serta dapat mempersempit ruang gerak oknum-oknum aparat pemerintah yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok mereka. Pengendalian internal memegang peran penting didalam memberikan pelayanan bagi kemajuan

instansi pemerintah khususnya didalam pencapaian target yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.

Sistem pelaporan dan pengendalian internal yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah daerah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memberikan penilaian berupa pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan lalu untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi sendiri dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Walaupun hasil penilaian dari BPK dan PANRB dihasilkan dari proses yang berbeda dan dilakukan oleh pihak yang berbeda seharusnya instansi memperoleh hasil yang sejalan dimana jika laporan keuangannya dinilai baik maka pengelolaan SAKIP dan capaian kinerjanya juga baik ([itjen.pu.go.id](http://itjen.pu.go.id)). Dilansir dari [TribunPontianak.co.id](http://TribunPontianak.co.id) (2019), BPK memberikan opini audit “Wajar Dengan Pengecualian” pada laporan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Barat yang berarti masih ditemukan penyimpangan pada laporan yang disajikan yaitu adanya pergeseran yang menyebabkan realisasi anggaran melampaui anggaran belanja yang ditetapkan.

Selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai 65,85 atau predikat B atas hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimana dari hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja serta pelayanan terhadap masyarakat (kalbarprov.go.id). Dari penilaian dan hasil audit tersebut, apabila laporan keuangan dinilai baik seharusnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kinerjanya juga baik hal ini disebabkan komponen penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bobotnya tinggi adalah perencanaan kinerja dan capaian kinerja, kedua hal ini mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan keuangan dan anggaran (Itjen.pu.go.id)

Penelitian tentang partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yaitu Susilowati (2014), Mongeri (2013), Agustin (2018), Cantika (2018) dan Aprilianti, dkk. (2020). Pada penelitian Susilowati (2014) menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif sedangkan variabel sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Dinas Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian oleh Mongeri (2013) menunjukkan variabel partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang. Penelitian oleh Agustin (2018) menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran, dan sistem pelaporan menunjukkan variabel kedua variabel tersebut berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah kota Yogyakarta. Penelitian oleh Cantika (2018) menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif sedangkan pengendalian internal merupakan variabel moderasi yang memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja akuntansi pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian oleh Aprilianti, dkk. (2020) menunjukkan variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh negatif sedangkan variabel pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan.

Hasil uji beberapa penelitian yang tidak konsisten mendorong peneliti untuk menguji kembali pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan subyek yang berbeda. Penelitian ini menggunakan objek Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dilansir dari [TribunPontianak.co.id](http://TribunPontianak.co.id), pada 27 Mei 2019, BPK memberikan opini audit “Wajar Dengan Pengecualian”. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Barat menetapkan opini Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Wajar Dengan Pengecualian, karena adanya pergeseran yang menyebabkan realisasi anggaran melampaui anggaran belanja yang ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan

demikian peneliti mengambil judul **“Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Hasil audit BPK terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memperoleh WDP memperlihatkan bahwa masih terdapat permasalahan keuangan yang dapat memunculkan potensi-potensi merugikan keuangan daerah. Untuk mencegah potensi-potensi buruk terjadi, pihak instansi perlu menyadari bahwa ada ancaman dari berbagai sumber seperti lingkungan internal yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian internal.

Partisipasi penyusunan anggaran diperlukan agar anggaran yang dibuat dapat sesuai dengan realita yang terjadi dilapangan, partisipasi anggaran dinilai dapat meningkatkan kinerja. Begitupula dengan kejelasan sasaran anggaran, jika realisasi anggaran suatu instansi sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan maka dapat dikatakan bahwa kinerja instansi tersebut baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas. Dalam mengimplementasikan anggaran juga diperlukan sistem pelaporan, jika sistem pelaporan berjalan dengan baik maka akan menghasilkan data-data keuangan yang dilaporkan secara detail sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas. Sistem pelaporan yang baik pun didukung oleh pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal memegang peran penting dalam instansi khususnya didalam pencapaian target yang telah ditetapkan, dengan meningkatnya kinerja instansi pemerintah maka akan

meningkat pula akuntabilitas pada instansi pemerintah daerah. Peneliti ingin mengetahui faktor-faktor internal diatas berperan penting dan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, apabila memang berpengaruh positif terhadap akuntabilitas, pastinya akan dijadikan pembenahan bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat agar akuntabilitas kinerja instansi menjadi lebih baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Susilowati (2018), Agustin (2018), Cantika (2018) dan Aprilianti, dkk (2018). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subyek penelitian yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu pada penelitian Agustin (2018) yang melakukan penelitian pada Pemerintah Kota Yogyakarta dimana alasan pemilihan subyek tersebut karena Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh opini tertinggi yaitu WTP namun masih terdapat sejumlah permasalahan keuangan. Dibandingkan dengan penelitian Agustin (2018), pada penelitian ini lebih menyoroti hasil audit dari BPK untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mendapatkan opini WDP dan hasil evaluasi SAKIP yang mendapatkan predikat B. Dari hasil tersebut menunjukkan apabila laporan keuangan dinilai baik seharusnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan kinerjanya juga baik hal ini disebabkan komponen penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bobotnya tinggi adalah perencanaan kinerja dan capaian kinerja.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah berikut:

1. Apakah Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat?
3. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat?
4. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, partisipasi anggaran, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan objek yang berbeda yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Kontribusi Teori**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam peningkatan dan memperluas pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **2. Kontribusi Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan informasi dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi Kalimantan Barat, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh variabel partisipasi anggaran memiliki nilai signifikansi 0,962 dan koefisien regresi sebesar 0,002. Hasil analisis regresi linear berganda hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil pengujian menyatakan bahwa  $H_1$  tidak dapat diterima atau ditolak. Berdasarkan dari pengujian deskriptif, partisipasi anggaran di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tergolong baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa walaupun hasil pengujian deskriptif partisipasi anggaran tergolong baik namun tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena dalam penyusunan anggaran membuktikan bahwa semakin sering pegawai dalam instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dilibatkan dalam penyusunan anggaran tidak selalu menunjukkan kinerja manajerial yang lebih baik, sebaliknya semakin jarang pegawai berpartisipasi dalam penyusunan anggaran tidak selalu menunjukkan kinerja manajerial yang buruk. Selain itu partisipasi

anggaran dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat hanya bersifat rutinitas, sehingga proses partisipasi anggaran yang dilakukan oleh respondenlah yang menyebabkan hasilnya tidak berpengaruh.

2. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai signifikansi 0,001 dan koefisien regresi sebesar 0,192. Hasil analisis regresi linear berganda hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah artinya hipotesis H2 diterima. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin jelasnya sasaran anggaran sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja dan juga dapat meningkatkan akuntabilitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah menyusun anggaran secara spesifik dan jelas, sehingga memudahkan para pelaksana anggaran dalam menerjemahkan anggaran dan pengukuran pencapaian tujuan organisasi sehingga pelaksanaan anggaran akan sesuai dengan tujuan disusunnya anggaran tersebut. Selain itu kejelasan sasaran anggaran pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memudahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang dianggap penting dan relevan dilingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat karena akan berdampak pada akuntabilitas instansi pemerintah yang berkaitan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga kejelasan

sasaran anggaran akan mendorong aparat pemerintah yang mempunyai wewenang agar lebih efektif dan melakukan yang terbaik dalam hal mengelola suatu anggaran.

3. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh variabel sistem pelaporan memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,251. Hasil analisis regresi linear berganda hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah artinya hipotesis H3 diterima. Sistem pelaporan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan yang baik akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan koreksi lebih efektif sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik, selain itu untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu dilakukan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan terkait dengan pelaporan anggaran.
4. Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh variabel pengendalian internal memiliki nilai signifikansi 0,000 dan koefisien regresi sebesar 0,473. Hasil analisis regresi linear berganda hipotesis pertama menunjukkan bahwa

variabel pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah artinya hipotesis H4 diterima. Sistem pengendalian internal pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan dengan baik, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi komunikasi dan aktivitas pemantauan telah sesuai dengan petunjuk, serta mengacu pada prinsip-prinsip pengendalian internal. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya anggaran dapat disusun dengan jelas apabila pengendalian internal yang diperlukan memadai. Dengan adanya pengendalian internal didalam suatu pemerintahan, akan mampu menciptakan proses kegiatan yang baik, sehingga memberikan keyakinan yang memadai untuk melindungi kekayaan pemerintah dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja instansi pemerintah dan tentu saja akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas mengenai kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian internal mendapatkan hasil yang sangat baik tetapi yang menjadi penyebab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerima opini audit Wajar Dengan Pengecualian selain itu Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperoleh nilai 65,85 atau predikat B atas hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dari penilaian dan hasil audit tersebut, apabila laporan keuangan dinilai baik seharusnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah dan kinerjanya juga baik hal ini disebabkan komponen penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bobotnya tinggi adalah perencanaan kinerja dan capaian kinerja. Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan masih perlu ditingkatkan. Selain itu dilansir oleh [bcpk.go.id](http://bcpk.go.id), pada 19 Februari 2020 sumber daya manusia yang mengelola keuangan di pemerintah Provinsi Kalimantan Barat masih banyak yang bukan berlatar belakang akuntansi, sehingga diperlukan *transfer of knowledge* dari BPKP agar kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat meningkat. Pada tahun 2020 pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan BPK Kalimantan Barat akan lebih banyak bersinergi untuk membenahi tata kelola keuangan dan pembangunan di wilayahnya.

Penelitian ini telah sesuai dan menunjukkan beberapa kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Hasil uji variabel partisipasi penyusunan anggaran dalam penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Mongeri (2018). Hasil uji variabel kejelasan sasaran anggaran konsisten dengan penelitian Susilowati (2014), Agustin (2018), Cantika (2018), dan Aprilianti, dkk (2018). Hasil uji variabel sistem pelaporan konsisten dengan penelitian Agustin (2018), Cantika (2018), dan Aprilianti, dkk (2018). Sedangkan hasil uji variabel pengendalian internal konsisten dengan penelitian Aprilianti, dkk (2018).

Dilihat dari kesimpulan diatas, maka hasil dari penelitian ini tidak sejalan dan tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mongeri (2018). Perbedaan hasil dari penelitian ini diduga oleh adanya perbedaan objek yang digunakan.

Perbedaan karakter aparat pemerintah daerah menyebabkan hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi.

## **5.2. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu dari 117 kuesioner yang disebar dalam 25 OPD, hanya 10 diantaranya tidak dikembalikan. Hal ini disebabkan oleh kesibukan responden. Selain itu mengenai lamanya waktu pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada kantor OPD Provinsi Kalimantan Barat membutuhkan waktu yang lama dikarenakan jarak antar lokasi kantor satu dan lainnya cukup jauh. Selain itu, diberlakukan sistem kerja dari rumah pada kantor OPD Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pengumpulan kuesioner membutuhkan waktu lebih lama.

## **5.3. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis dapat melakukan penelitian pada objek lain untuk membuktikan konsisten hasil penelitian.
2. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar lebih dapat lebih memperhatikan untuk mengevaluasi dan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh BPK terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) Provinsi Kalimantan Barat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan untuk tahun sebelumnya sehingga untuk tahun yang akan datang dapat meningkatkan penilaian opini dari tahun sebelumnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M.F. (2005). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan* (Edisi Kedua). Malang, Indonesia: Penerbitan Universitas Muhammadiyah.
- Agustin, K. (2018). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Anthony, R.N., dan Govindarajan, V. (2005). *Management Control System* (Edisi 1). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Aprilianti, D., Wulan, M., dan Kurniawan, H. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 9 No. 2.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Cantika, Y. (2018). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Davis, K., dan Newstron, J.W. (2000). *Perilaku Dalam Organisasi* (Edisi 7). Jakarta, Indonesia: Erlangga.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Semarang, Indonesia: Universitas Diponegoro.
- Gudono. (2009). *Teori Organisasi* (Edisi 1). Yogyakarta, Indonesia: Pencil Press.



- Halim, A. (2007). *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.
- Hansen, D. R., dan Mowen, M. M. (2013). *Akuntansi Manajerial, Edisi Kedelapan, Alih Bahasa: Deny Arnos Kwary*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis : Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (Edisi 6). Yogyakarta: BPFE.
- Haryono, S. (2005). Struktur Kepemilikan Dalam Bingkai Teori Keagenan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5, No.1.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan*. Keuangan Salemba Empat, Jakarta.
- Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No.4.
- Kenis, I. (1979). Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*. Vol 54 No.4.
- Krismiaji. (2012). *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta, Indonesia: Akademia Manajemen Perusahaan YKPN.
- Kusumaningrum, I. (2010). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. Tesis. Universitas Diponegoro: Program Pascasarjana.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah. Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI.

- Lembaga Administrasi Negara-LAN. 2003. Keputusan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003. Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Locke, E. A., and Latham, G. P. (1990). *A theory of goal setting and task performance*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi 3). Yogyakarta, Indonesia: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mongeri, M. (2013). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang)*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Mulyadi. (2001). *Sistem Akuntansi* (Edisi 3). Jakarta, Indonesia: Salemba. Empat.
- Murwanto, R. (2012). *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar Bagi Pembangunan Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta, Indonesia: LPKPAP.
- Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Nordiawan, D., dan Ayuningtyas, H. (2010). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah Indonesia.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2007). *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi Kelima. Jakarta.

Steers, R. M., and Porter, L.W. (1987). *Motivation and Leadership at Work*. New York: McGrawHill.

Sugijanto. (2002). Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintasan Ekonomi*. Volume 19 Nomor 1.

Susilowati, H. (2014). *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Motivasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Pemerintah Kota Surakarta)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tugiman, H. (2006). *Standar Profesional Audit Internal*. Yogyakarta: Kanisius.

Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## REFERENSI

- Bpkp.go.id (2020, 19 Februari). *Pembenahan Sinergi BPK dan BPKP Kalbar*. (Diakses dari <http://www.bpkp.go.id/berita/read/23594/0/Pembenahan-Sinergi-BPK-dan-BPKP-Kalbar.bpkp> tanggal 30 Januari 2021)
- Itjen.pu.go.id (2020, 11 Mei). *Korelasi Opini Audit BPK dengan Hasil Evaluasi Sakip Kementerian PUPR*. (Diakses dari [http://itjen.pu.go.id/single\\_kolom/36](http://itjen.pu.go.id/single_kolom/36) tanggal 21 September 2020)
- Kalbarprov.go.id (2020, 10 November). *Wagub Kalbar: "SAKIP Ciptakan ASN lebih berdaya guna"*. (Diakses dari <https://kalbarprov.go.id/berita/wagub-kalbar-sakip-ciptakan-asn-lebih-berdaya-guna.html> tanggal 15 Maret 2021)
- TribunPontianak.co.id (2019, 27 Mei). *Pemprov Kalbar Raih Opini WDP dari BPK RI*. (Diakses dari <https://pontianak.tribunnews.com/2019/05/27/pemprov-kalbar-raih-opini-wdp-dari-bpk-ri-berikut-penjelasan-auditor-keuangan-negara-bpk-ri> tanggal 31 Agustus 2019)



**KUESIONER PENELITIAN**  
**PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN,**  
**SISTEM PELAPORAN, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Responden

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi guna menyelesaikan tugas akhir program studi S1 Akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner mengenai **Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**. Saya mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan menjawab seluruh pernyataan kuesioner ini dengan lengkap dan sebenar-benarnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang tepat sasaran. Atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

### A. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
3. Umur : .....Tahun
4. Jabatan : .....
5. Bidang/Divisi Pekerjaan : .....
6. Lama Menjabat : .....Tahun
7. Pendidikan :  Akuntansi  
 Non Akuntansi

### B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berilah tanda (√) pada kolom dimasing- masing pernyataan dibawah ini yang menurut anda sesuai dengan yang anda rasakan. Terdapat lima alternatif jawaban untuk setiap pernyataan, antara lain:

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

CS = Cukup Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

### 1. PARTISIPASI ANGGARAN

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1	Saya terlibat aktif dalam setiap penyusunan anggaran					
2	Adanya forum diskusi antara pegawai dan atasan sebelum penetapan anggaran					
3	Usulan penetapan anggaran yang diusulkan oleh pegawai pernah ditanggapi oleh atasan					
4	Adanya penilaian positif terhadap kontribusi yang diberikan oleh pegawai					
5	Pegawai selalu dimintai usulan setiap periode penyusunan anggaran					
6	Pegawai dimintai usulan apabila atasan merasa membutuhkan pendapat dari orang lain					



## 2. KEJELASAN SASARAN ANGGARAN

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan rencana kerja dan anggaran telah terdefinisikan dengan jelas dan komprehensif.					
2	Pada instansi tempat saya bekerja, tujuan rencana kerja dan anggaran telah disesuaikan dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).					
3	Pada instansi tempat saya bekerja, sasaran anggaran telah diketahui sangat jelas dan spesifik.					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, dibutuhkan keahlian dan pengetahuan untuk mencapai sasaran anggaran (RBA).					
5	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran dan partisipasi penyusunan anggaran merupakan salah satu faktor dominan yang mendukung tujuan-tujuan instansi secara efektif.					
6	Pada instansi tempat saya bekerja, antara					

	penganggaran dengan pelaksanaan/realisasinya telah tepat sasaran yang nantinya digunakan untuk mencapai tujuan instansi secara efektif					
7	Pada instansi tempat saya bekerja, anggaran merupakan harapan bagi instansi di awal tahun anggaran sedangkan pada akhir tahun anggaran, anggaran merupakan standar untuk mengevaluasi kinerja instansi					

### 3. SISTEM PELAPORAN

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1	Pada instansi tempat saya bekerja, laporan keuangan telah disajikan secara lengkap.					
2	Laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja, telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu.					
3	Pada instansi tempat saya					

	bekerja, informasi telah disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan khusus.					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, informasi keuangan pada laporan keuangan yang dihasilkan dapat diuji					
5	Informasi keuangan yang disajikan oleh instansi tempat saya bekerja dapat dipahami oleh pengguna serta dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.					

#### 4. PENGENDALIAN INTERNAL

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1	Pimpinan di tempat saya bekerja selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai.					

2	Struktur organisasi di tempat saya bekerja telah menggambarkan pembagian kewenangan dan tanggungjawab pegawai.					
3	Pimpinan di tempat saya bekerja selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.					
4	Pimpinan di tempat saya bekerja telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi/keuangan.					
5	Pimpinan ditempat saya bekerja selalu memiliki rencana pengelolaan untuk mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi/keuangan.					
6	Semua transaksi yang dientri dan diproses ke dalam komputer adalah seluruh transaksi					

	yang telah diotorisasi.					
7	Pengeluaran uang di tempat saya bekerja selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas yang telah diberi nomor urut tercetak.					
8	Pengguna anggaran/pemegang kas di tempat saya bekerja telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tepat pada waktunya.					
9	Informasi di tempat saya bekerja telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat.					

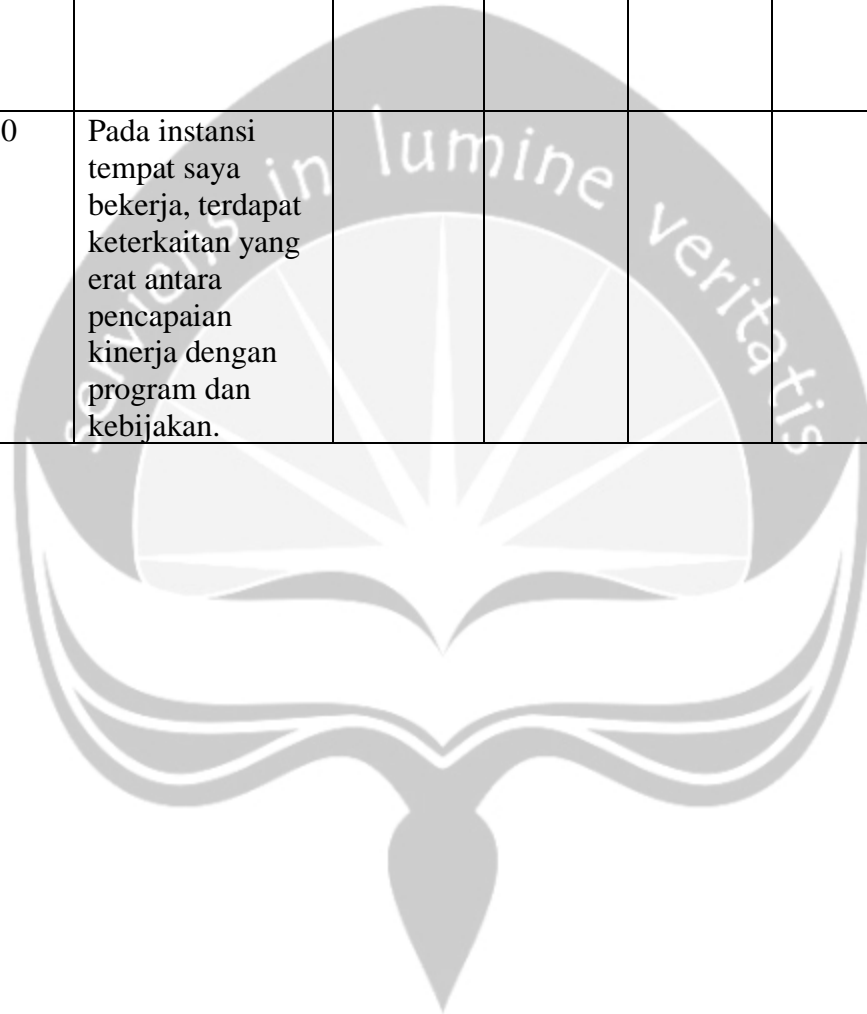
### 5. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

No	Pernyataan	STS 1	TS 2	CS 3	S 4	SS 5
1	Pada instansi tempat saya bekerja, kejelasan sasaran anggaran suatu program telah dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin.					

2	Visi dan misi program instansi tempat saya bekerja, telah ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
3	Pada instansi tempat saya bekerja, telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program yang akan dilaksanakan.					
4	Pada instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan analisis keuangan untuk setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.					
5	Pada instansi tempat saya bekerja, dilakukan pembuatan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang akan disampaikan kepada atasan.					

6	Pada instansi tempat saya bekerja, telah dilakukan pengecekan terhadap jalannya program/kegiatan yang sedang dilaksanakan.					
7	Pada instansi tempat saya bekerja, pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas, untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program					
8	Kegiatan / program yang disusun oleh instansi tempat saya bekerja telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat.					
9	Pada instansi tempat saya bekerja, LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan					

	diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.					
10	Pada instansi tempat saya bekerja, terdapat keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					









**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Fax. (0561) 730062  
 PONTIANAK

Kode Pos 78124

Pontianak, Desember 2020

Nomor	: 800/1375/ADPIM-A	Kepada	
Sifat	: -	Yth. Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Lampiran	: -	di-	
Hal	: Jawaban Permohonan Pencarian Data dan Penyebaran Kuesioner	Yogyakarta	

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 1410/Kues/I tanggal 25 November 2020 Perihal Pencarian Data dan Penyebaran Kuesioner untuk Penulisan Skripsi, dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Program Studi Bisnis dan Ekonomika pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dapat disetujui dan memberikan Ijin, kepada :

Nama	: LISUDATU TRIFOSA ALLORANTE
NIM	: 22921
Program Studi	: S-1 Bisnis dan Ekonomika
Lokasi/Tempat	: Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Waktu	: Mulai tanggal 07 Desember s.d 15 Desember 2020

untuk melaksanakan penelitian di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat guna penulisan Skripsi dengan judul "**Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**".

2. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, diharapkan kepada mahasiswa tersebut agar senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 Asisten Administrasi dan Umum  
 u.b  
 Kepala Biro Administrasi Pimpinan,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar;
2. Asisten Administrasi dan Umum Setda Prov. Kalbar.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Telpun (0561) 741163 Fax (0561) 764919  
**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

Pontianak, 11 Desember 2020

Kepada

Nomor	: 1410/5711 SATPOL.PP-SET	Yth.	Wakil Dekan I
Sifat	: Biasa		Universitas Atma Jaya
Lampiran	: -		Yogyakarta
Hal	: Ijin Pencarian Data dan penyebaran kuesioner untuk penulisan skripsi	di-	Tempat

Dengan hormat, menindaklanjuti surat Nomor : 1410/Kues/I Perihal Pencarian data dan penyebaran kuesioner untuk penulisan, maka Kami memberikan ijin kepada Mahasiswa atas nama :

N a m a	: Lisudatu Trifosa Allorante
No Mhs/Prodi	: 22921/Akuntansi
No Hp	: 081257114398
Alamat	: Jl. Tambak Bayan No.4, Janti, Caturtunggal, Depok, Sleman

Melakukan Pencarian data dan penyebaran kuesioner untuk penulisan skripsi yang berjudul "**Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan barat**" di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

  
**Y. ANTHONIUS RAWING, SE., M.Si.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19660902 199403 1 005



No Responden	Partisipasi Anggaran (X1)						Total X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	
1	4	5	4	4	4	4	25
2	4	5	4	4	4	4	25
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	5	4	4	4	4	25
5	5	5	5	5	4	3	27
6	5	5	4	5	4	5	28
7	3	5	5	5	4	3	25
8	5	5	5	5	4	3	27
9	4	4	4	4	3	4	23
10	4	4	4	4	3	5	24
11	4	4	4	4	3	4	23
12	4	4	4	4	3	4	23
13	5	5	5	5	4	4	28
14	4	5	5	3	5	3	25
15	3	3	3	4	3	4	20
16	4	5	5	3	5	3	25
17	3	3	3	4	3	4	20
18	4	4	4	4	4	4	24
19	3	4	4	5	4	5	25
20	4	5	4	4	5	4	26
21	4	4	4	4	3	4	23
22	3	4	5	5	5	5	27
23	4	3	3	3	3	4	20
24	3	4	5	5	5	5	27
25	4	4	4	4	3	5	24
26	4	4	4	4	3	4	23
27	4	5	5	5	5	5	29
28	5	5	5	5	4	5	29
29	5	4	3	3	3	4	22
30	4	4	4	4	3	4	23
31	4	5	5	5	5	5	29
32	4	3	4	4	3	3	21
33	5	4	4	4	4	4	25
34	4	3	4	4	3	3	21
35	4	3	4	4	3	3	21
36	5	5	5	5	5	5	30

37	5	5	5	5	5	5	30
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	4	4	4	4	24
40	5	5	4	4	3	3	24
41	4	5	5	5	5	5	29
42	4	4	4	4	4	4	24
43	4	5	5	5	5	5	29
44	4	4	4	4	4	4	24
45	5	5	5	5	5	5	30
46	5	5	4	5	5	5	29
47	4	4	4	4	4	4	24
48	4	4	4	4	4	4	24
49	5	5	5	5	5	5	30
50	5	5	5	5	5	5	30
51	4	4	4	4	4	3	23
52	4	4	4	4	4	3	23
53	4	5	5	5	5	5	29
54	4	4	4	4	4	4	24
55	4	4	4	4	4	4	24
56	4	4	4	4	4	4	24
57	3	4	3	5	3	5	23
58	4	5	4	4	4	4	25
59	4	4	4	4	4	4	24
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	4	4	4	4	24
62	5	4	4	4	4	5	26
63	4	4	5	3	4	4	24
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	5	5	5	2	27
66	5	5	5	5	5	5	30
67	5	5	4	4	3	4	25
68	4	4	4	4	4	4	24
69	5	5	5	5	5	5	30
70	5	5	5	4	4	4	27
71	5	4	4	4	4	3	24
72	4	4	5	3	4	4	24
73	4	4	4	4	4	4	24
74	5	5	5	4	4	4	27

75	4	3	5	4	4	5	25
76	4	3	5	4	5	5	26
77	4	4	4	4	4	4	24
78	4	4	4	4	4	4	24
79	4	4	4	4	4	4	24
80	5	5	5	5	5	5	30
81	4	4	3	3	4	4	22
82	4	4	4	4	4	4	24
83	4	4	5	4	5	4	26
84	4	4	4	4	4	3	23
85	4	4	4	4	4	4	24
86	4	4	4	4	4	4	24
87	4	4	5	4	5	4	26
88	5	4	5	4	4	5	27
89	4	5	5	5	5	5	29
90	4	4	4	4	4	4	24
91	5	4	4	4	4	4	25
92	5	5	5	5	4	5	29
93	4	2	4	4	3	4	21
94	4	5	5	5	5	5	29
95	4	2	4	4	2	3	19
96	4	4	4	4	4	4	24
97	4	4	4	4	2	2	20
98	4	5	5	5	5	5	29
99	4	5	3	4	4	4	24
100	5	5	5	4	4	5	28
101	4	4	4	4	3	4	23
102	4	5	4	5	4	5	27
103	4	5	4	5	4	5	27
104	4	5	3	4	4	4	24
105	4	4	4	4	4	4	24
106	4	4	5	4	5	4	26
107	4	5	3	4	4	4	24

No Responden	Kejelasan Sasaran Anggaran (X2)							Total X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	
1	4	5	4	4	4	4	4	29
2	4	5	4	4	4	4	4	29

3	4	4	5	4	4	4	4	29
4	4	5	4	4	4	4	4	29
5	5	5	5	4	5	5	4	33
6	5	4	4	3	4	5	3	28
7	5	5	5	4	5	5	4	33
8	5	5	5	4	5	5	4	33
9	4	5	5	5	5	5	5	34
10	4	5	5	5	5	5	5	34
11	4	5	5	5	5	5	5	34
12	4	5	5	5	5	5	5	34
13	5	5	5	5	4	4	4	32
14	4	5	5	3	4	4	5	30
15	3	5	5	4	4	5	4	30
16	4	5	5	3	4	4	5	30
17	3	5	5	4	4	5	4	30
18	4	4	4	4	4	4	4	28
19	4	4	4	4	4	4	5	29
20	5	5	4	4	5	5	5	33
21	4	5	5	5	5	5	5	34
22	4	4	5	4	5	4	4	30
23	5	5	5	4	5	5	4	33
24	4	4	4	4	4	4	4	28
25	4	5	5	5	5	5	5	34
26	4	5	5	5	5	5	5	34
27	5	5	5	5	5	5	5	35
28	5	5	5	5	5	5	5	35
29	3	5	5	3	4	5	5	30
30	4	5	5	5	5	5	5	34
31	5	5	5	5	5	5	5	35
32	4	4	4	2	3	3	4	24
33	4	4	4	4	4	4	4	28
34	4	4	4	2	3	3	4	24
35	4	4	4	2	3	3	4	24
36	5	5	5	4	4	4	5	32
37	5	5	5	5	5	5	5	35
38	4	4	4	5	5	4	4	30
39	4	4	4	5	5	4	4	30
40	4	5	4	4	4	3	4	28



41	5	5	5	5	5	5	5	35
42	3	3	4	4	4	4	4	26
43	5	5	5	5	5	5	5	35
44	3	3	4	4	4	4	4	26
45	5	5	5	5	5	5	3	33
46	5	5	5	5	5	5	5	35
47	4	4	4	5	4	4	4	29
48	4	4	4	5	4	4	4	29
49	5	5	5	4	4	5	5	33
50	5	5	5	4	4	5	5	33
51	4	4	3	4	4	4	4	27
52	4	4	3	4	4	4	4	27
53	5	5	5	5	5	5	5	35
54	4	4	3	4	4	4	4	27
55	4	4	3	4	4	4	4	27
56	4	4	3	4	4	4	4	27
57	5	5	5	4	5	5	5	34
58	5	5	4	4	4	4	4	30
59	4	4	4	4	4	4	4	28
60	4	4	4	4	4	4	4	28
61	4	4	4	4	4	4	4	28
62	5	4	4	3	5	5	4	30
63	3	4	4	4	4	4	4	27
64	4	4	4	4	4	4	4	28
65	5	5	5	4	4	4	4	31
66	5	5	4	4	5	5	5	33
67	4	5	4	3	5	4	4	29
68	4	4	4	4	4	4	4	28
69	5	5	5	4	5	5	5	34
70	5	5	5	5	5	5	5	35
71	5	5	5	4	4	4	4	31
72	3	4	4	4	4	4	4	27
73	4	4	4	4	4	4	4	28
74	5	5	5	5	5	5	5	35
75	5	5	4	4	5	5	5	33
76	5	5	4	4	5	5	5	33
77	4	4	4	4	4	4	4	28
78	4	4	4	4	4	4	4	28

79	4	4	4	4	4	4	4	28
80	5	5	5	5	5	5	5	35
81	2	3	2	4	3	3	4	21
82	4	4	4	4	4	4	4	28
83	5	5	4	4	4	5	5	32
84	4	4	4	4	4	4	4	28
85	4	4	4	4	4	4	4	28
86	4	4	4	4	4	4	4	28
87	5	5	4	4	4	5	5	32
88	3	4	3	4	4	4	5	27
89	5	5	5	4	4	4	4	31
90	4	4	4	4	4	4	4	28
91	4	4	4	4	4	4	4	28
92	5	5	5	5	5	5	5	35
93	4	4	4	2	4	4	4	26
94	5	5	5	4	4	4	4	31
95	4	4	2	4	4	4	4	26
96	4	4	4	3	4	4	4	27
97	5	5	5	4	4	4	4	31
98	5	5	5	4	4	4	4	31
99	4	5	5	4	4	4	4	30
100	4	4	4	3	4	4	3	26
101	4	4	4	4	4	4	4	28
102	4	4	4	4	4	4	5	29
103	4	4	4	4	4	4	5	29
104	4	5	5	4	4	4	4	30
105	4	4	4	4	4	4	4	28
106	5	5	4	4	4	5	5	32
107	4	5	5	4	4	4	4	30

No Responden	Sistem pelaporan (X3)					Total X3
	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	5	25

6	5	4	3	5	5	22
7	5	5	5	5	5	25
8	5	5	5	5	5	25
9	5	5	4	4	4	22
10	5	5	4	4	4	22
11	5	5	4	4	4	22
12	5	5	4	4	4	22
13	5	5	4	5	5	24
14	5	5	5	5	5	25
15	3	4	5	5	5	22
16	5	5	5	5	5	25
17	3	4	5	5	5	22
18	4	4	4	4	4	20
19	5	5	4	4	4	22
20	5	4	5	5	5	24
21	5	5	4	4	4	22
22	4	4	4	4	4	20
23	4	4	4	4	4	20
24	4	4	4	4	4	20
25	5	5	4	4	4	22
26	5	5	4	4	4	22
27	5	5	5	5	5	25
28	5	5	5	5	5	25
29	5	3	3	5	4	20
30	5	5	4	4	4	22
31	5	5	5	5	5	25
32	4	4	3	3	4	18
33	4	4	4	4	4	20
34	4	4	3	3	4	18
35	4	4	3	3	4	18
36	5	4	4	4	5	22
37	5	5	4	4	4	22
38	4	4	4	4	4	20
39	4	4	4	4	4	20
40	5	4	4	5	5	23
41	5	5	4	5	5	24
42	4	3	4	4	4	19
43	5	5	4	5	5	24

44	4	3	4	4	4	19
45	4	4	4	4	4	20
46	4	5	5	5	5	24
47	4	5	4	4	4	21
48	4	5	4	4	4	21
49	5	4	5	5	5	24
50	5	4	5	5	5	24
51	4	4	4	4	4	20
52	4	4	4	4	4	20
53	5	5	4	4	5	23
54	4	3	4	4	4	19
55	4	3	4	4	4	19
56	4	3	4	4	4	19
57	4	5	3	5	5	22
58	4	3	3	4	4	18
59	5	4	4	4	4	21
60	5	4	4	4	4	21
61	5	4	4	4	4	21
62	5	4	3	4	5	21
63	3	4	3	4	3	17
64	5	4	4	4	4	21
65	5	4	4	4	4	21
66	5	5	5	5	5	25
67	4	3	2	2	4	15
68	5	4	4	4	4	21
69	5	5	4	5	5	24
70	5	5	5	5	5	25
71	5	4	3	4	4	20
72	3	4	3	4	3	17
73	5	4	4	4	4	21
74	5	5	5	5	5	25
75	4	4	5	4	5	22
76	4	4	5	4	5	22
77	5	4	4	4	4	21
78	5	4	4	4	4	21
79	4	4	4	4	4	20
80	5	4	2	4	5	20
81	4	3	3	3	4	17

82	5	4	4	4	4	21
83	5	4	4	5	5	23
84	5	4	4	4	4	21
85	4	4	4	4	4	20
86	5	4	4	4	4	21
87	5	4	4	5	5	23
88	3	3	3	4	3	16
89	5	4	5	5	5	24
90	5	4	4	4	4	21
91	4	4	4	4	4	20
92	5	4	5	5	4	23
93	4	4	3	2	2	15
94	5	4	5	5	5	24
95	4	4	3	2	2	15
96	4	4	3	4	4	19
97	5	4	4	4	4	21
98	5	4	5	5	5	24
99	4	4	4	3	4	19
100	4	4	4	4	4	20
101	4	4	4	4	4	20
102	4	4	4	4	5	21
103	4	4	4	4	5	21
104	4	4	4	3	4	19
105	4	4	4	4	4	20
106	5	4	4	5	5	23
107	4	4	4	3	4	19

No Responden	Pengendalian Internal (X4)									Total X4
	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	
1	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
2	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
3	4	5	5	5	5	4	4	5	4	41
4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	38
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
6	5	5	5	4	5	5	4	5	4	42
7	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
8	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44



47	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
48	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37
49	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
50	5	5	5	5	5	5	5	5	4	44
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
53	5	5	5	5	5	5	4	5	5	44
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
57	5	5	5	5	5	3	3	5	5	41
58	4	4	4	3	3	3	4	3	3	31
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
62	3	4	3	3	3	5	5	4	4	34
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
66	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
67	4	4	3	2	3	4	4	4	4	32
68	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
69	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
70	5	5	5	5	5	4	5	5	5	44
71	4	5	5	4	4	4	5	5	4	40
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
73	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
74	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
75	4	5	4	5	5	5	5	4	4	41
76	4	5	4	5	4	4	4	5	5	40
77	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
78	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
79	5	5	5	5	5	5	5	5	5	45
80	5	5	4	4	4	5	4	4	4	39
81	2	3	2	3	3	4	4	5	4	30
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
83	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
84	4	4	5	4	4	4	4	4	4	37

85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
87	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
88	4	3	3	3	3	4	4	4	4	32
89	4	4	4	4	5	5	5	5	4	40
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
92	5	4	4	4	5	5	5	5	4	41
93	4	4	3	3	3	4	3	3	3	30
94	4	4	4	4	5	5	5	5	4	40
95	4	4	3	3	3	4	3	3	3	30
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
97	4	4	4	4	4	4	4	5	4	37
98	4	4	4	4	5	5	5	5	4	40
99	3	4	4	3	3	3	3	3	3	29
100	4	4	3	4	3	4	4	4	4	34
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
102	4	4	4	5	4	5	4	4	4	38
103	4	4	4	5	4	5	4	4	4	38
104	3	4	4	3	3	3	3	3	3	29
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	36
106	4	4	4	4	4	5	5	5	5	40
107	3	4	4	3	3	3	3	3	3	29

No Responden	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)										Total Y
	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	42
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
6	4	4	5	5	5	5	5	4	5	4	46
7	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
8	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	49
9	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	44
10	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	45
11	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	44



12	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	44
13	4	5	5	4	5	4	4	3	5	5	44
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
15	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	44
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
17	4	4	5	5	4	4	4	5	4	5	44
18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	39
19	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	41
20	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	49
21	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	44
22	5	5	4	4	4	5	5	5	4	5	46
23	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	45
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
25	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	45
26	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	44
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
28	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	48
29	4	4	5	3	3	4	4	3	3	4	37
30	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	44
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50
32	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	37
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
34	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	35
35	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	35
36	4	5	5	5	5	5	5	4	5	5	48
37	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	45
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
40	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	42
41	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	45
42	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	34
43	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	45
44	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	34
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
46	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	47
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
49	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	47



88	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	36
89	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
92	2	4	5	4	4	4	4	5	4	4	40
93	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	35
94	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
95	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	35
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
98	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	43
99	3	5	5	3	5	3	3	3	4	4	38
100	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	38
101	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	39
102	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
103	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	41
104	3	5	5	3	5	3	3	3	4	4	38
105	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40
106	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	42
107	3	5	5	3	5	3	3	3	4	4	38



### Partisipasi Anggaran

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Total_X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.423**	.336**	0.176	0.182	0.080	.496**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.071	0.060	0.413	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X1.2	Pearson Correlation	.423**	1	.406**	.479**	.559**	.269**	.760**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.005	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X1.3	Pearson Correlation	.336**	.406**	1	.462**	.630**	.262**	.739**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.006	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X1.4	Pearson Correlation	0.176	.479**	.462**	1	.433**	.473**	.718**
	Sig. (2-tailed)	0.071	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X1.5	Pearson Correlation	0.182	.559**	.630**	.433**	1	.419**	.799**
	Sig. (2-tailed)	0.060	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107
X1.6	Pearson Correlation	0.080	.269**	.262**	.473**	.419**	1	.625**
	Sig. (2-tailed)	0.413	0.005	0.006	0.000	0.000		0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107
rata_X1	Pearson Correlation	.496**	.760**	.739**	.718**	.799**	.625**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



rata_X2	Pearson Correlation	.685**	.813**	.749**	.654**	.829**	.851**	.661**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Sistem Pelaporan

		Correlations					
		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Total_X3
X3.1	Pearson Correlation	1	.446**	.278**	.401**	.416**	.661**
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.004	0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107
X3.2	Pearson Correlation	.446**	1	.399**	.372**	.347**	.668**
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107
X3.3	Pearson Correlation	.278**	.399**	1	.623**	.534**	.767**
	Sig. (2-tailed)	0.004	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107
X3.4	Pearson Correlation	.401**	.372**	.623**	1	.744**	.847**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107
X3.5	Pearson Correlation	.416**	.347**	.534**	.744**	1	.813**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	107	107	107	107	107	107
rata_X3	Pearson Correlation	.661**	.668**	.767**	.847**	.813**	1

	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Pengendalian Internal

		Correlations										
		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	X4.7	X4.8	X4.9	Total_X4	
X4.1	Pearson Correlation	1	.502**	.530**	.500**	.466**	.409**	.371**	.351**	.443**	.665**	
	Sig. (2-tailed)		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
X4.2	Pearson Correlation	.502**	1	.557**	.549**	.667**	.457**	.484**	.556**	.438**	.754**	
	Sig. (2-tailed)	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
X4.3	Pearson Correlation	.530**	.557**	1	.769**	.694**	.236*	0.188	.413**	.522**	.720**	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000		0.000	0.000	0.014	0.053	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
X4.4	Pearson Correlation	.500**	.549**	.769**	1	.765**	.429**	.276**	.542**	.628**	.802**	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.004	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
X4.5	Pearson Correlation	.466**	.667**	.694**	.765**	1	.592**	.475**	.718**	.604**	.880**	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	
X4.6	Pearson Correlation	.409**	.457**	.236*	.429**	.592**	1	.690**	.620**	.566**	.734**	
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.014	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	





Y3	Pearson Correlation	0.154	.538**	1	.350**	.577**	.402**	.349**	.263**	.370**	.504**	.601**
	Sig. (2-tailed)	0.112	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.006	0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Y4	Pearson Correlation	.605**	.575**	.350**	1	.331**	.583**	.567**	.616**	.600**	.591**	.813**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Y5	Pearson Correlation	0.176	.459**	.577**	.331**	1	.530**	.296**	.256**	.336**	.391**	.580**
	Sig. (2-tailed)	0.070	0.000	0.000	0.000		0.000	0.002	0.008	0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Y6	Pearson Correlation	.485**	.398**	.402**	.583**	.530**	1	.747**	.637**	.362**	.549**	.771**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Y7	Pearson Correlation	.555**	.438**	.349**	.567**	.296**	.747**	1	.601**	.445**	.625**	.769**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Y8	Pearson Correlation	.420**	.297**	.263**	.616**	.256**	.637**	.601**	1	.349**	.436**	.669**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.002	0.006	0.000	0.008	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Y9	Pearson Correlation	.600**	.559**	.370**	.600**	.336**	.362**	.445**	.349**	1	.570**	.729**
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
Y10	Pearson Correlation	.604**	.616**	.504**	.591**	.391**	.549**	.625**	.436**	.570**	1	.812**

	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
rata_Y	Pearson Correlation	.740**	.765**	.601**	.813**	.580**	.771**	.769**	.669**	.729**	.812**	1
	Sig. (2-tailed)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
	N	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).





**LAMPIRAN V**

## Partisipasi Anggaran

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.782	6

## Kejelasan Sasaran Anggaran

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.864	7

## Sistem Pelaporan

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.810	5

## Pengendalian Internal

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
0.908	9

## Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

### Reliability Statistics

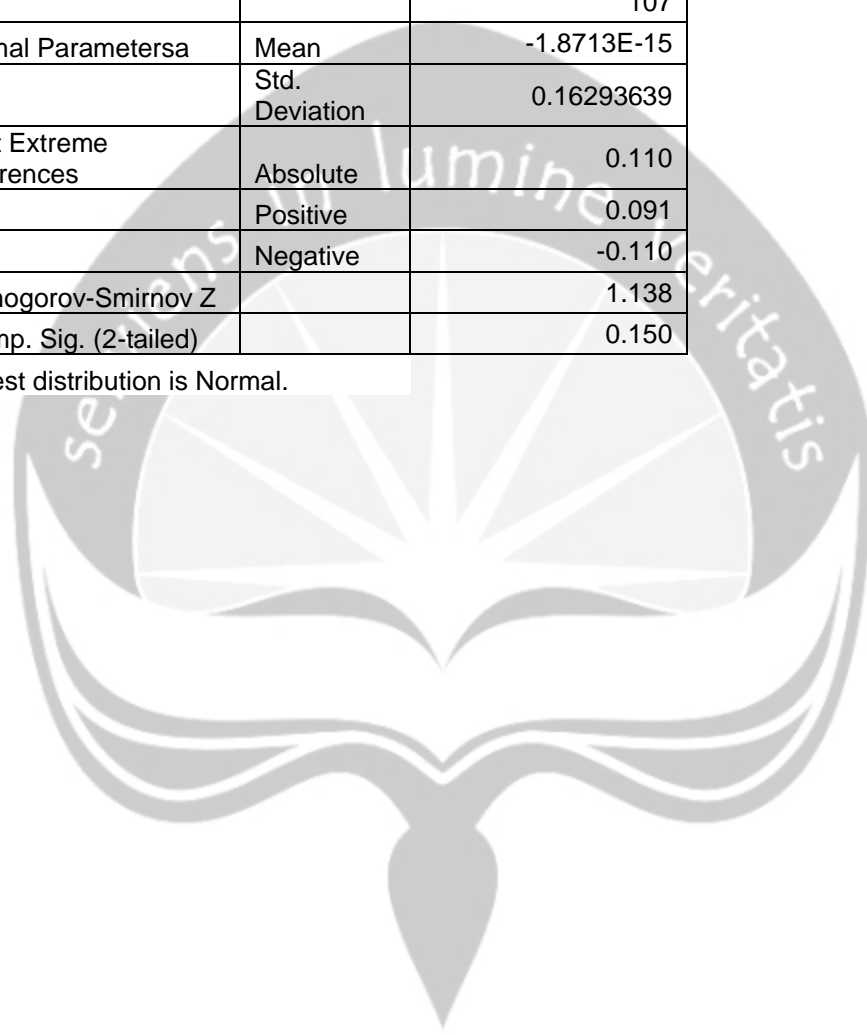
Cronbach's Alpha	N of Items
0.900	10



### Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		107
Normal Parametersa	Mean	-1.8713E-15
	Std. Deviation	0.16293639
Most Extreme Differences	Absolute	0.110
	Positive	0.091
	Negative	-0.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.138
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.150

a. Test distribution is Normal.







## Uji Multikolinearitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.289	.182		1.586	.116
	Partisipasi Anggaran	.002	.045	.002	.047	.962
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.192	.059	.203	3.277	.001
	Sistem pelaporan	.251	.063	.281	4.004	.000
	Pengendalian Internal	.473	.066	.510	7.173	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah





### Uji Heterokedastisitas

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.025	.124		.204	.839
	Partisipasi Anggaran	.008	.031	.034	.277	.783
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.034	.040	.134	.843	.401
	Sistem pelaporan	-.016	.043	-.068	-.379	.706
	Pengendalian Internal	-.005	.045	-.019	-.103	.918

a. Dependent Variable: RES2





## Uji Hipotesis

**Variables Entered/Removed<sup>b</sup>**

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengendalian Internal, Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem pelaporan <sup>a</sup>		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.922 <sup>a</sup>	.850	.844	.166100

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem pelaporan

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.289	.182		1.586	.116
	Partisipasi Anggaran	.002	.045	.002	.047	.962
	Kejelasan Sasaran Anggaran	.192	.059	.203	3.277	.001
	Sistem pelaporan	.251	.063	.281	4.004	.000
	Pengendalian Internal	.473	.066	.510	7.173	.000

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

